

BAB IV

P E N U T U P

Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mencapai visi ***Purbalingga Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berakhlak Mulia***, sebagaimana gambaran tingkat pencapaian sasaran dari hasil analisis dan pengukuran akuntabilitas kinerja tahun 2015 yang telah diuraikan dalam Bab III, melalui berbagai program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010–2015, secara umum telah diperoleh nilai sangat baik yaitu 108%.

Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang ingin diwujudkan, telah diperoleh hasil pencapaian sasaran dengan kategori sangat baik sejumlah 23 (dua puluh tiga) sasaran, yang memperoleh capaian kinerja dalam kategori baik sebanyak 3 (tiga) sasaran dan yang memperoleh capaian kinerja dalam kategori cukup baik sebanyak 1 (satu) sasaran.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain.

1. Kualitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik belum seperti yang diharapkan serta ketersediaan SDM aparatur yang terbatas.
2. Menurunnya angka partisipasi sekolah yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan.
3. Laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi.
4. Meningkatnya angka pengangguran sejalan dengan meledaknya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja.
5. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya, yaitu :

- 1) Mengatasi permasalahan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih relatif rendah (tuntutan *good governance*) terhadap penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik serta ketersediaan SDM aparatur yang terbatas pertama, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah :
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

- b. Penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Penguatan kualitas administrasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur
 - d. Penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
 - e. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas, dan peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan reward and punishment.
- 2) Mengatasi permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.
- 3) Mengatasi permasalahan meningkatnya angka pengangguran sejalan dengan meledaknya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja adalah peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial serta pelayanan perijinan yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investor.
- 4) Mengatasi permasalahan kemiskinan, langkah-langkah kebijakan yang diterapkan adalah :
- a. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menitikberatkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan *updating* data PMKS, serta sistem penanganan PMKS.
 - b. Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta mendorong berkembangnya UMKM.
 - c. Fasilitasi penyediaan permukiman yang layak huni.

Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk:

1. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai strategi dan arah kebijakan yang digariskan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam rangka pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia secara maksimal.
5. Dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan guna mengarahkan pada pencapaian sasaran dan tujuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana yang diharapkan.

Purbalingga, Maret 2016

